

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data kependudukan Kemendagri Indonesia di semester 1 jumlah penduduk Indonesia per 30 juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Hal ini didukung dengan luas daratan dan lautan Indonesia yang membentang dan membentuk kepulauan dari sabang sampai merauke. Tentunya kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah dan dengan luas negara tersebut, Indonesia dituntut dapat mengolah sumber daya alam yang melimpah demi keberlangsungan hidup rakyatnya.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terhubung dari pemimpin negara yaitu Presiden hingga ke lembaga terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) yang dinaungi oleh kepala desa. Walaupun sistem pemerintahan sudah bagus, pedesaan masih tertinggal dan luput dari perhatian pemerintah pusat. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan bagi penduduk pedesaan. Mengingat penduduk Indonesia lebih senang menempati pedesaan.

Sementara dalam mencapai tujuan utama pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Dengan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional dan berdampak signifikan terhadap upaya menciptakan stabilitas nasional. Desa merupakan unsur lembaga dasar negara yang potensi alamnya belum tersentuh dikelola secara detail oleh pemerintah pusat (Sa'dullah, 2016).

Bantuan pemerintah benar-benar diperlukan untuk membuat peningkatan kehidupan yang unggul di bidang keuangan, sosial, dan politik. Meskipun demikian, bantuan pemerintah kepada masyarakat pedesaan di Indonesia masih rendah dan keadaan keuangan yang masih minim dalam tahap pembangunan, sehingga bantuan pemerintah kepada masyarakat Indonesia sangat penting untuk ditingkatkan dengan melibatkan pemerintah kabupaten. Penguatan provinsi membutuhkan waktu lebih lama daripada mengembangkan penilaian pajak lebih lanjut dan BUMN kuat sebagai kekuatan yang diharapkan untuk mengalahkan masalah dan menciptakan desain baru pada perekonomian Indonesia (Basri dan Munandar, 2018).

Pembangunan merupakan arah dengan tujuan akhir untuk memajukan suatu negara, termasuk bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya adalah pembangunan kota yang harus tertib dan lengkap dengan memperhatikan kebutuhan asli kota. Oleh karena itu, pengembangan kota harus disesuaikan dengan potensi dan kelemahan masing-masing kota. Untuk memahami kemajuan kota, ia memainkan peran pemerintah kota dan dukungan dari daerah setempat, hal ini karena daerah lebih memperhatikan masalah dan kemampuan kota sehingga untuk situasi ini daerah hanya titik fokus dari ukuran pembangunan kota itu sendiri.

Secara historis, desa menandai pembentukan komunitas politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa terbentuk, dan struktur sosial seperti desa, masyarakat adat, dll. (Widjaja, 2015). Pendapatan yang layak sangat diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Mengembangkan potensi desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa. Jika pendapatan yang dihasilkan masyarakat meningkat,

kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi dan mereka akan jauh dari garis kemiskinan. sehingga kesejahteraan mereka menjadi lebih menjanjikan (Suharto, 2017).

Menurut Budiono (2015), salah satu pendekatan untuk mendorong perbaikan di tingkat desa adalah pemerintah desa yang disetujui secara terpusat, diawasi secara bebas oleh kota melalui lembaga keuangan tingkat kota. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini adalah tentang Pembentukan, Pengoperasian, Arahan dan Pembubaran Peraturan Permendes No. BUMDes. Badan Usaha Milik Desa, yang disebut BUMDES, adalah organisasi/departemen keuangan kota, badan hukum yang didirikan dan diiklaim oleh pemerintah desa, di mana semua modal atau sebagian besar sumber daya kota dipisahkan, bebas dan profesional, diawasi secara finansial oleh Akhirnya, BUMDes dibentuk dengan tekad untuk memperoleh manfaat untuk membentengi Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian kota, dan menggarap jaringan bantuan pemerintah provinsi.

Motivasi di balik BUMDes adalah untuk memajukan administrasi sumber daya kota yang ada, memajukan ekonomi kota, dan mengerjakan bantuan pemerintah daerah kota. Ide bisnis BUMDes adalah manfaat. Ide perbaikan adalah kepercayaan, partisipatif dan masuk akal. Selanjutnya, kapasitas BUMDes sebagai pendorong utama perekonomian kota, sebagai organisasi yang menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes), hanya sebagai salah satu cara untuk mendukung percepatan peningkatan kerja jaringan bantuan pemerintah provinsi. Dengan hadirnya BUMDES dipercaya kota akan menjadi lebih mandiri dan daerah menjadi lebih sejahtera.

Sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Permendes No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Pengurus BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan mewajibkan pelaksanaan keuangan daerah dalam struktur kelembagaan atau unsur usaha yang diawasi secara ahli, namun tergantung pada kemampuan awal kota. Hal ini dapat membuat organisasi area lokal lebih berguna dan menarik. Nantinya BUMDes akan berfungsi sebagai tumpuan otonomi negara sekaligus sebagai yayasan yang mewajibkan pengelolaan keuangan daerah yang menciptakan sesuai kualitas kota untuk menggarap bantuan pemerintah daerah kota.

BUMDes Bina Usaha di Desa Grejeng Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik merupakan salah satu BUMDes yang berkembang di Kabupaten Gresik dan masuk kategori BUMDes berkembang menurut Data Desa Center Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2020, BUMDes tersebut telah berdiri sejak tahun 2016. BUMDes Bina Usaha tersebut bergerak di bidang wahana pariwisata, air mineral, sewa terop, program simpan pinjam dan bank sampah.

Jika dibandingkan dengan BUMDes Suci Sejahterah di Desa Suci Manyar Gresik. BUMDes Bina Usaha lebih berkembang, hal tersebut dapat dilihat pada program dan penghasilan yang diperoleh maka BUMDes Bina Usaha lebih unggul. Dimana BUMDes Bina usaha memiliki penghasilan dari wahana pariwisata, air mineral, sewa terop, program simpan pinjam dan bank sampah. Pencapaian minimum BUMDes Bina Usaha yakni sebesar 35 juta perbulan. Sementara itu BUMDes Suci Sejahterah program yang dimiliki yakni Agen Pos BUMDes dan

Lumbung Pangan. Pendapatan BUMDes Suci Sejahtera masih minim dan dibawah 5 juta perbulan (<https://desasuci-gresik.com/bumdes>).

Selama berjalan hampir 5 tahun lebih, tentunya BUMDes telah berkembang dan memiliki struktur. Tetapi dalam mengelola keuangan dan kelembagaan BUMDes perlu pertanggung jawaban dan keterbukaan supaya masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan penghasilan BUMDes. Karena BUMDes memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan desa sehingga pengelola BUMDes memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat desa.

Sebagaimana dikemukakan Zulkarnaen (2016), penelitiannya menyimpulkan bahwa keberadaan BUMDes sangat diperlukan untuk mewujudkan ekonomi desa yang mandiri. Melalui program BUMDes, lembaga masyarakat harus saling mendukung secara optimal dan menciptakan kesejahteraan bersama yang setara. Pemerintah desa dan lembaga desa harus segera membentuk pengurus BUMDes agar dapat segera menghimpun unit-unit usaha masyarakat secara lebih efektif dan mengelola aset desa sehingga BUMDes berupaya mewujudkan kesejahteraan bersama yang adil.

Selain itu dalam mengelola BUMDes, sistematis dan prosedurnya harus jelas dan transparan. Pengurus BUMDes harus memahami tata kelola dan pelaksanaan dalam mengurus BUMDes demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Irawati dan Martanti (2017) yang menyatakan bahwa Praktik akuntansi yang transparan dalam bentuk laporan keuangan yang diadakan oleh BUMDes dan balai desa Karang Bendo akan menumbuhkan rasa percaya diri dan mengkomunikasikan hasilnya kepada masyarakat saat melaporkan peningkatan aset yang dimiliki oleh BUMDes dan balai desa Karang Bendo dapat dilihat.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Indriyanthi, *et al* (2021) menyatakan pengelolaan maupun akuntabilitas dari laporan keuangan BUMDes harus berjalan dengan baik. Pengelolaan BUMDes yang baik harus didukung oleh kinerja pengurus BUMDes yang harus memahami indikator pengelolaan BUMDes seperti perencanaan pelaksanaan pelaporan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban. Sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes akan maksimal dan maju, berkembang dan memberikan sumbangsih kepada desa masing masing jika pengurus BUMDes transparan dan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya penelitian Suhu, *et al* (2020) menyatakan Keberhasilan pengelolaan BUMDes Geti Baru di bawah kepemimpinan BUMDes terbukti dengan proses pendirian atau pembentukan BUMDes yang melibatkan seluruh anggota tingkat desa termasuk pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Proses pelaksanaan bisnis BUMDes juga terkontrol dengan baik, dan pendapatan jual beli BUMDes sangat tinggi, dengan pendapatan per bulan Rp 12.000.000, mencapai Rp 144.000.000 dalam setahun. Selain itu, kewajiban pelaporan dan pembukuan pengurus BUMDes sepenuhnya dilaporkan melalui pemberitahuan tertulis kepada pengurus desa yang dilaporkan setahun sekali. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan BUMDes Bina Usaha di Desa Grejag Kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Bina Usaha di Desa Grejag Kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Bina Usaha di Desa Grejeg Kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Seperti halnya yang telah disampaikan pada tujuan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Wawasan pengetahuan bagi penulis dan para pembaca terkait keuangan dan kelembagaan BUMDes
2. Bagi BUMDes yang masih tidak akhir diharapkan dapat memberikan gambaran dan motivasi untuk memajukan BUMDesnya
3. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.